

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebanyak 1,3 miliar orang di 107 negara berkembang pada tahun 2020 hidup dalam kemiskinan multidimensi (UNDP OPHI, 2020, p. 3). Sebagai fenomena multidimensional, kemiskinan tidak hanya mencerminkan keterbatasan ekonomi, tetapi juga berdampak pada berbagai aspek kehidupan termasuk kesehatan, pendidikan dan akses terhadap layanan dasar (Maharani et al., 2024). Penelitian yang dilakukan oleh Fadillah (2021) mengungkapkan bahwa negara berkembang seperti Indonesia menghadapi tantangan khusus dalam pengentasan kemiskinan karena kompleksitas faktor sosial-ekonomi dan kesenjangan infrastruktur yang berbeda-beda.

Di tengah dinamika global tersebut, Indonesia menghadapi tantangan serupa dalam upaya pengentasan kemiskinan (Laoh et al., 2023). Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa dalam lima tahun terakhir angka kemiskinan sempat mengalami peningkatan dari tahun 2019 hingga puncaknya pada tahun 2021 dengan jumlah 27,54 juta jiwa. Namun setelah itu terjadi penurunan hingga mencapai 25,9 juta pada tahun 2023 (Yashilva, 2024).

Pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai program pengentasan kemiskinan, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Dana Desa, Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako merupakan bantuan sosial rutin yang

sudah berjalan ditambah dengan bantuan pangan berupa beras untuk memastikan akses pangan dalam menjaga stabilitas harga. Upaya ini bertujuan agar rumah tangga miskin tetap dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka (Kurniadi, 2024; Yashilva, 2024). Namun, evaluasi terhadap efektivitas program-program tersebut mengungkapkan adanya tantangan yang signifikan dengan ketidakoptimalan sasaran penerima bantuan sosial (Noerkaisar, 2021; Salsabila et al., 2024).

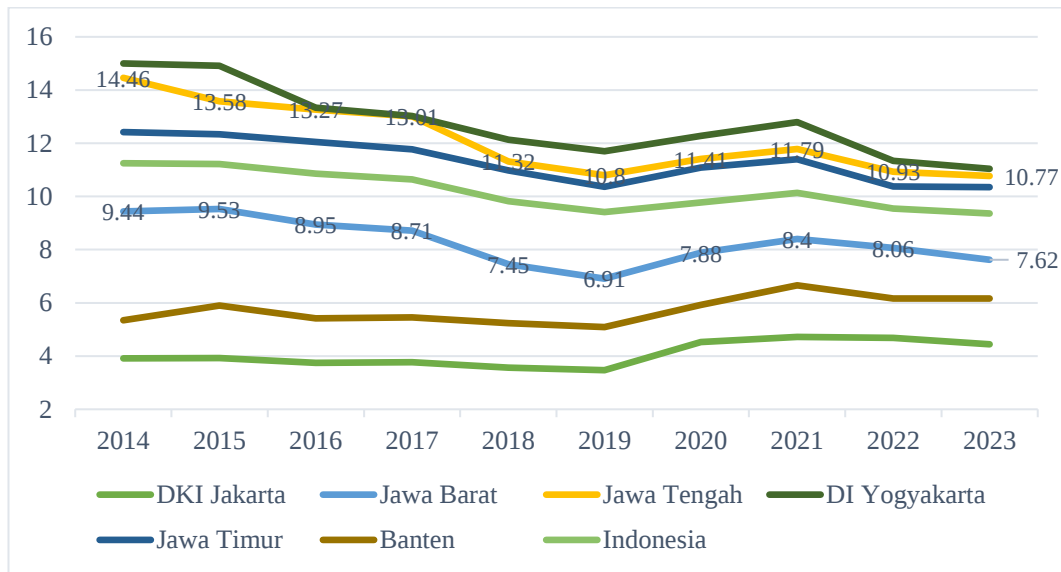
Dalam mengimplementasikan program-program tersebut, menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 pemerintah Indonesia menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai basis data untuk penentuan penerima bantuan sosial. Dari laman Dinas Sosial Lampung Tengah (2024) menyebutkan bahwa DTKS bukan merupakan alat ukur utama kemiskinan di Indonesia. DTKS lebih berfungsi sebagai instrument pendataan untuk targeting program bantuan sosial serta memperlihatkan komposisi tingkat kesejahteraan masyarakat dari yang terendah. Sementara itu untuk pengukuran resmi kemiskinan tetap dilakukan oleh BPS melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) (D. Nugroho et al., 2020, p. 20).

Pendekatan *Capability Approach* yang dikembangkan Amartya Sen memberikan kerangka komprehensif untuk memahami kompleksitas kemiskinan. Teori ini menekankan bahwa kemiskinan bukan sekedar kekurangan pendapatan, tetapi juga mencakup keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang layak (Sen, 1992). Sarjito (2024a) dan Putra (2022) dalam penelitiannya memvalidasi relevansi pendekatan ini dalam konteks di Indonesia, di mana akses pendidikan dan kesehatan memiliki hubungan dengan kemiskinan.

Kemiskinan ini sejalan dengan salah satu tujuan dari *Sustainable Development Goals* (SDGs), di mana pengentasan kemiskinan menjadi tujuan pertama dalam agenda pembangunan global.

Disparitas regional dalam tingkat kemiskinan menjadi perhatian khusus, terutama di Pulau Jawa sebagai pusat ekonomi dan pemerintahan Indonesia (Ayu, 2024). Meskipun memiliki infrastruktur dan fasilitas yang relatif lebih baik, penelitian yang dilakukan oleh Maulana dan Desmawan (2023) mengungkapkan bahwa tingkat kemiskinan yang tinggi di beberapa provinsi di Pulau Jawa tetap menjadi suatu tantangan tersendiri. Sebagai pusat ekonomi Indonesia, Pulau Jawa tidak hanya berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga mencerminkan dinamika sosial-ekonomi yang memengaruhi kondisi nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan infrastruktur dan letak strategis tidak serta merta menjamin pemerataan kesejahteraan ekonomi. Selain itu, kompleksitas permasalahan kemiskinan di Pulau Jawa membutuhkan intervensi kebijakan yang tepat sasaran untuk mengurangi kesenjangan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya.

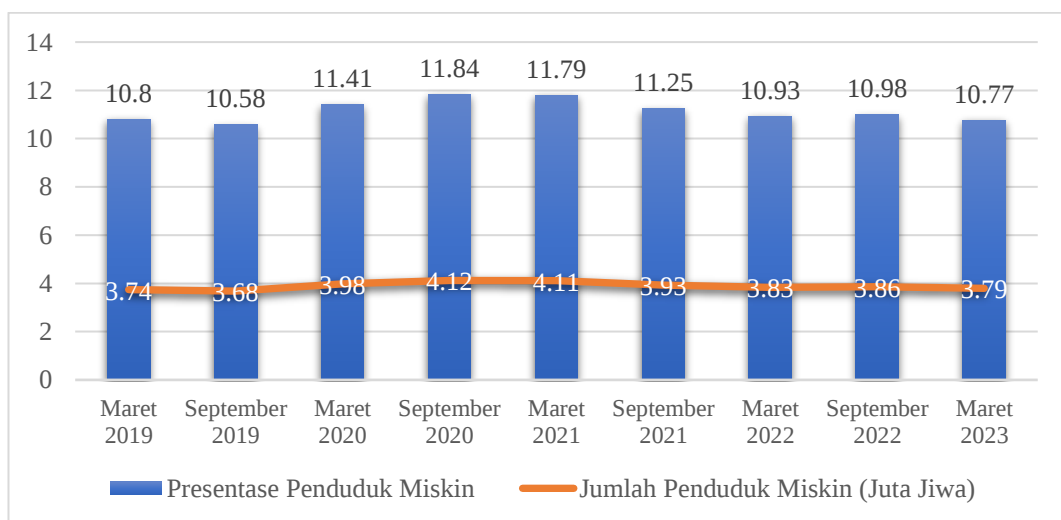
Jawa Tengah, sebagai salah satu provinsi terpadat di Indonesia, menunjukkan dinamika yang kompleks selama lebih dari satu dekade terakhir. Tingkat kemiskinan di provinsi ini menunjukkan pola fluktuatif yang signifikan, mencerminkan tantangan berkelanjutan dalam upaya pengentasan kemiskinan (F. D. R. Sari & Ediwijoyo, 2021).



Sumber: BPS Indonesia (diolah penulis)

Gambar 1.1 Persentase Penduduk Miskin di Pulau Jawa dan Indonesia

Berdasarkan gambar 1.1 diketahui dari tahun 2014 sampai 2023 persentase kemiskinan di Pulau Jawa dinilai berfluktuatif. Data menunjukkan tingkat kemiskinan di Jawa Tengah merupakan yang kedua tertinggi di Pulau Jawa setelah Daerah Istimewa Yogyakarta (DI Yogyakarta).



Sumber: Laporan BPS Jawa Tengah (2024) (diolah penulis)

Gambar 1.2 Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Jawa Tengah

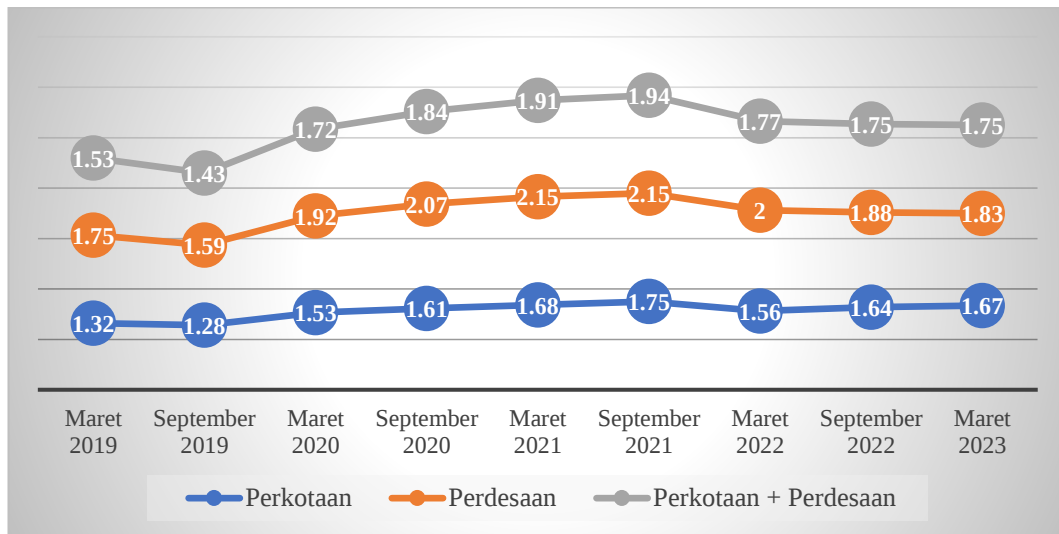
Selain itu, berdasarkan gambar 1.2, kondisi Jawa Tengah menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin mencapai 10,77% pada Maret 2023, mengalami sedikit penurunan dari September 2022. Meskipun penurunan ini menunjukkan perkembangan yang positif, tingkat kemiskinan di Jawa Tengah masih berada di atas rata-rata nasional yang mencapai 9,36%. Hal ini sejalan dengan laporan dari Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Jawa Tengah yang menyebutkan bahwa meskipun Jawa Tengah merupakan salah satu pusat pertumbuhan nasional, namun angka kemiskinan di provinsi ini masih di atas nasional (Prasetyo et al., 2023).

Dalam konteks penanganan kemiskinan, pemerintah provinsi Jawa Tengah telah mengimplementasikan berbagai program bantuan sosial yang terintegrasi. Pada tahun 2023 melalui Baznas Jawa Tengah, telah mendistribusikan bantuan berupa 255 Unit Rumah Tangga Layak Huni (RTLH), 500 Jamban, dan 1.664 modal usaha (W. A. Nugroho, 2023). Program-program ini merupakan bagian dari strategi komprehensif untuk mengatasi kemiskinan multidimensi, sebagaimana direkomendasikan oleh Kemenko PMK yang menekankan pentingnya intervensi terpadu seperti pemberdayaan masyarakat dalam pengentasan kemiskinan (Kemenko PMK, 2021).

Kajian spasial temporal kemiskinan di tingkat kabupaten/kota di Jawa Tengah oleh Sari (2024) mengidentifikasi bahwa *hotspot* kemiskinan di Jawa Tengah terkonsentrasi di kabupaten bagian barat hingga pesisir selatan, dengan enam kabupaten yang secara konsisten menjadi *hotspot* berdasarkan persentase penduduk miskin, yaitu Kabupaten Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara,

Kebumen, dan Purworejo. Hal ini menandakan bahwa tingkat kemiskinan di kabupaten-kabupaten tersebut cukup tinggi, begitu pula di wilayah sekitarnya. Secara fisik, wilayah-wilayah ini menunjukkan karakteristik yang serupa sehingga diperlukan perhatian khusus dalam perumusan kebijakan daerah untuk mengatasi kemiskinan dan mendorong perkembangan ekonomi yang setara dengan wilayah lainnya. Dengan demikian pendekatan berbasis wilayah menjadi bentuk prioritas dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Pemahaman terhadap kemiskinan di Jawa Tengah tidak dapat dilepaskan dari kompleksitas aspek sosial-ekonominya, terutama jika dilihat melalui indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan. Kemiskinan di Jawa Tengah memiliki karakteristik yang berbeda antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Di wilayah perkotaan, kemiskinan sering berkaitan dengan keterbatasan akses terhadap layanan sosial dan tekanan urbanisasi (Watif et al., 2024). Sedangkan di wilayah perdesaan kemiskinan umumnya disebabkan oleh rendahnya produktivitas pertanian, keterbatasan lahan, upah yang rendah, dan kurangnya akses ke pasar serta sumber ekonomi lainnya. Selain itu, rendahnya kompetensi, akses pendidikan, layanan kesehatan, dan inovasi pertanian yang belum sesuai dengan kondisi lahan turut memperburuk keadaan (Prasetyo et al., 2023). Hal ini menunjukkan bahwa masalah kemiskinan di Jawa Tengah mencerminkan ketimpangan struktural yang mendalam dalam sistem sosial-ekonominya baik di perkotaan maupun di perdesaan.

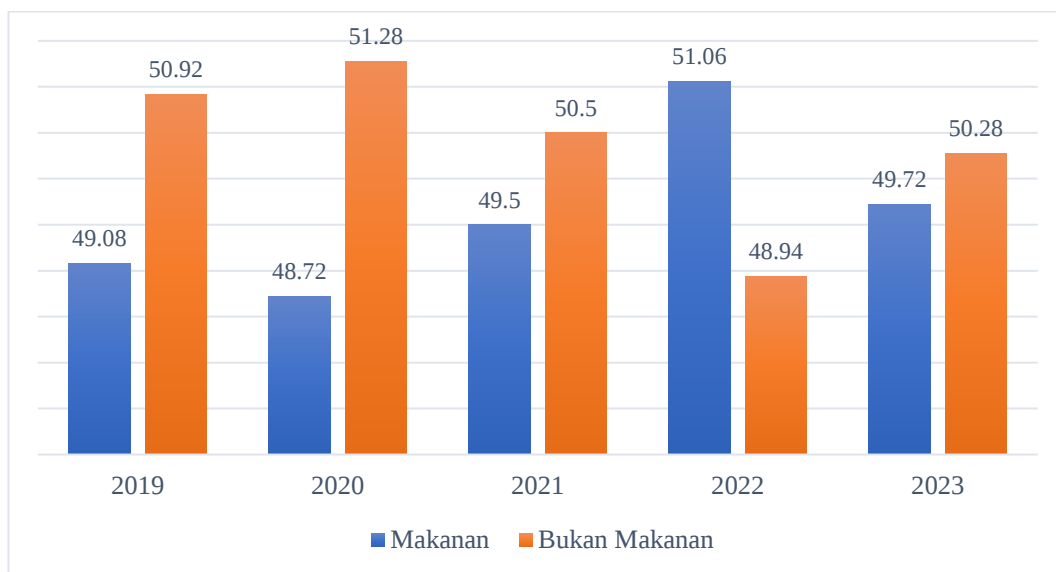


Sumber: Laporan BPS Jawa Tengah (2024) (diolah penulis)

Gambar 1.3 Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan gambar 1.3 diketahui Indeks kedalaman kemiskinan di Jawa Tengah yang mencapai angka 1,75 mengindikasikan adanya kesenjangan yang signifikan antara tingkat pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan baik di perkotaan maupun di perdesaan. Indeks kedalaman kemiskinan di Jawa Tengah selalu melebihi angka indeks kedalaman kemiskinan nasional. Hal ini sejalan dengan penelitian Utama dan Sari (2023) yang menyatakan bahwa indeks kedalaman kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur selalu berada di atas angka nasional.

Selain itu, dari sisi ekonomi kemiskinan dapat dilihat dari pola pengeluaran rumah tangga, terutama dalam pembagian antara pengeluaran untuk makanan dan non-makanan. Rumah tangga yang menghabiskan sebagian besar pendapatannya untuk kebutuhan makanan biasanya termasuk dalam kategori miskin (Puspita & Agustina, 2020).



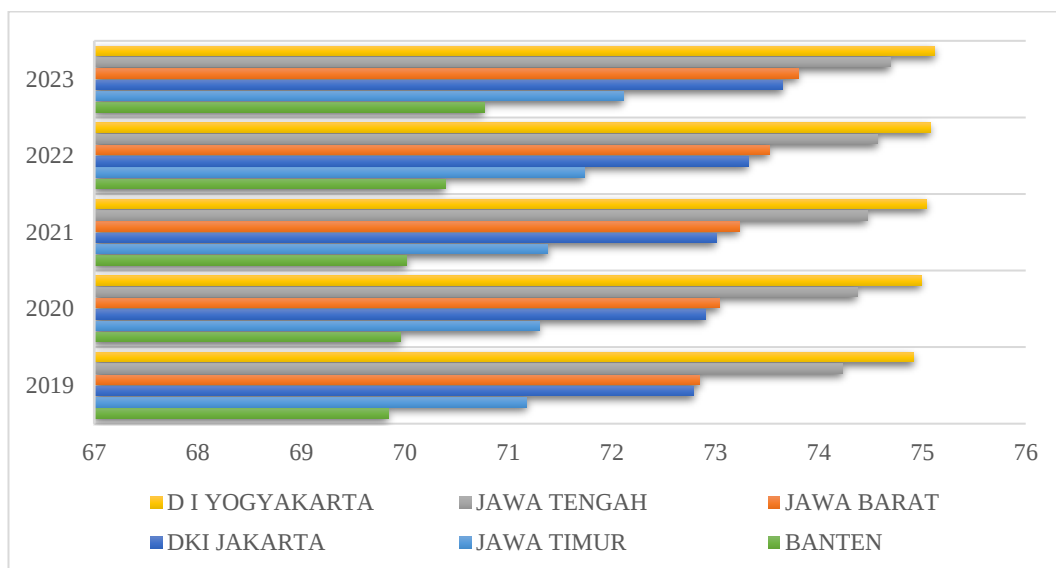
Sumber: BPS Jawa Tengah (diolah penulis)

Gambar 1.4 Persentase Pengeluaran per Kapita Sebulan Makanan dan Bukan Makanan Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan gambar 1.4, menunjukkan bahwa meskipun pengeluaran non-makanan pada tahun 2023 relatif tinggi, hal ini tidak serta merta mengindikasikan peningkatan kesejahteraan. Meskipun pengeluaran non makanan lebih tinggi, melihat indeks kedalaman kemiskinan yang mencapai angka 1,75 (gambar 1.3) indeks ini menunjukkan bahwa masih ada kelompok masyarakat yang hidup jauh di bawah garis kemiskinan.

Fenomena tersebut mengidentifikasi adanya perbedaan signifikan antara pekerja sektor formal dan informal. Di mana pekerja sektor informal menghadapi tantangan lebih besar karena ketidakstabilan pendapatan mereka, yang secara langsung memengaruhi kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan secara konsisten. Situasi ini membuat mereka lebih rentan terhadap guncangan ekonomi dan lebih beresiko jatuh ke dalam kemiskinan (Sibagariang et al., 2023).

Selain dimensi sosial-ekonomi, keterkaitan antara kemiskinan dengan kesehatan dan pendidikan juga menunjukkan pola yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan. Juliansyah et al. (2024) menggarisbawahi bahwa tingkat pendidikan yang rendah dan akses terbatas terhadap layanan kesehatan berkualitas membentuk siklus kemiskinan yang sulit diputus. Penelitian mereka mengungkapkan bahwa peningkatan kualitas pendidikan, akses kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal menjadi faktor utama dalam upaya pengentasan kemiskinan.

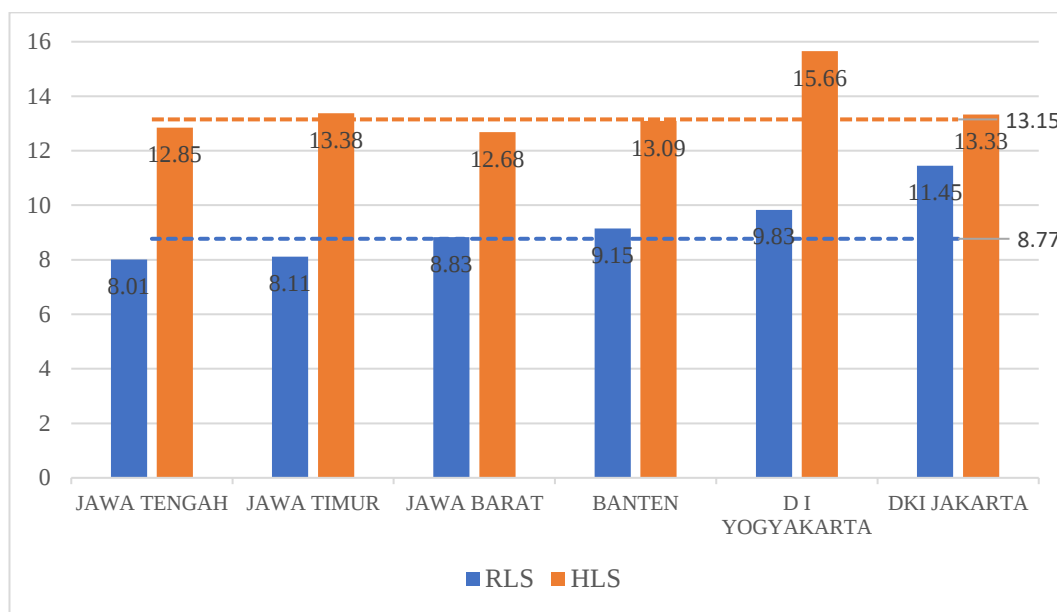


Sumber: BPS Jawa Tengah (diolah penulis)

Gambar 1.5 Usia Harapan Hidup (Tahun) Provinsi Jawa Tengah

Pada gambar 1.5 menunjukkan tren positif yang tercermin dari peningkatan usia harapan hidup dalam lima tahun terakhir. Peningkatan ini mengindikasikan adanya perbaikan substansial dalam sistem kesehatan dan kualitas hidup masyarakat, yang dapat dikaitkan dengan beberapa faktor seperti membaiknya aspek ke fasilitas kesehatan, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, perbaikan

sanitasi lingkungan, dan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pola hidup sehat. Fenomena ini menunjukkan keberhasilan program kesehatan dalam menjangkau masyarakat miskin.



Sumber: BPS Jawa Tengah (diolah penulis)

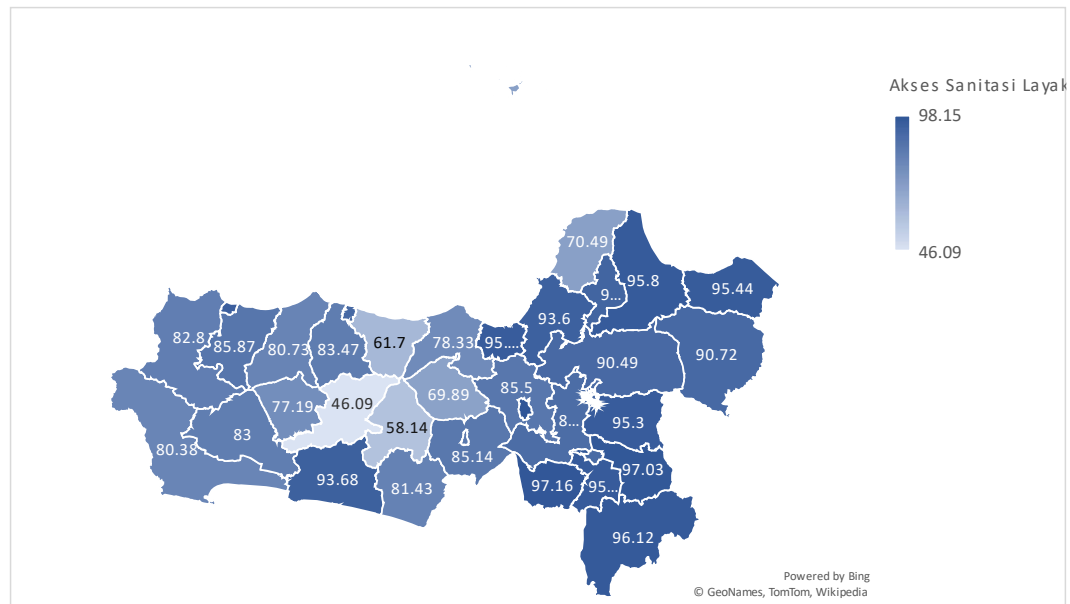
Gambar 1.6 Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah (Tahun)
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

Sementara itu, dalam dimensi pendidikan yang ditunjukkan gambar 1.6 menunjukkan bahwa kondisi rata-rata lama sekolah sebesar 8,01 tahun merupakan posisi terendah di Pulau Jawa dan berada di bawah rata-rata lama sekolah nasional yang mencapai 8,77 tahun. Demikian pula dengan harapan lama sekolah yang mencapai 12,85 tahun menempati posisi kedua terendah setelah Jawa Barat dan masih di bawah rata-rata nasional yang mencapai 13,15 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah masih jauh dan belum mencapai harapan lama sekolah yang diharapkan dari tiap individu di Jawa Tengah pada tahun 2023.

Fenomena ini menunjukan adanya kesenjangan antara capaian dimensi kesehatan dan pendidikan. Meskipun terdapat perbaikan dalam dimensi kesehatan, kompleksitas dampaknya terhadap kemiskinan dan rendahnya capaian pendidikan dapat menghambat upaya pengentasan kemiskinan secara keseluruhan. Kondisi ini mengindikasikan perlunya perhatian khusus terhadap sektor pendidikan di Jawa Tengah, serta penguatan sistem jaminan sosial untuk mengantisipasi dampak negatif dari peningkatan usia harapan hidup.

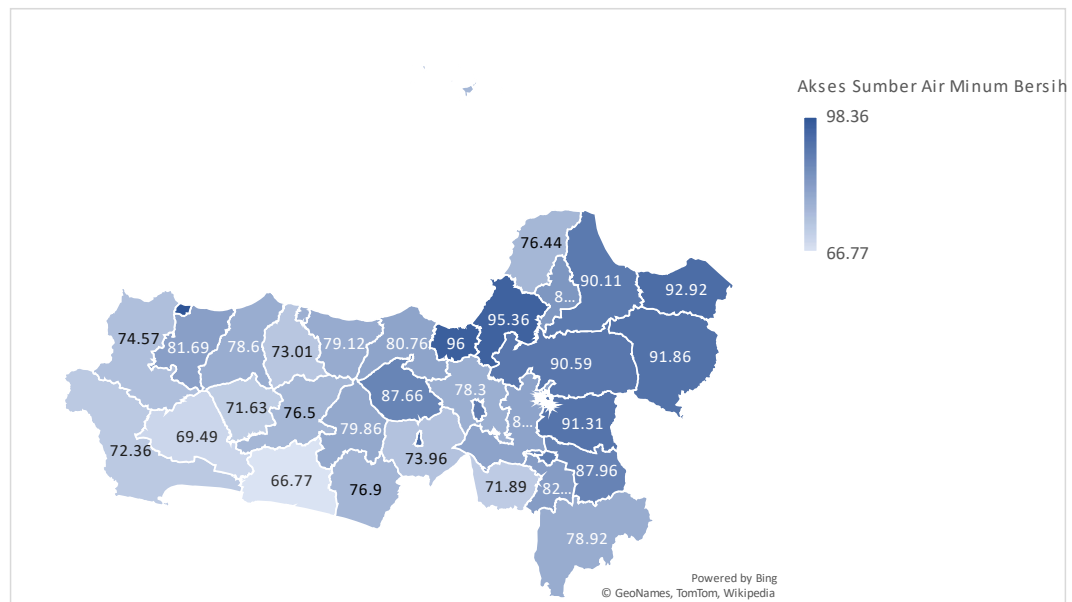
Selain dari kesehatan dan pendidikan, akses terhadap infrastruktur dasar atau standar hidup layak juga merupakan komponen krusial dalam upaya pengentasan kemiskinan. Andrianus dan Alfatih (2023) mengidentifikasi bahwa akses terhadap air minum bersih, sanitasi layak, dan sumber penerangan yang memadai berkorelasi kuat dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Air bersih dan sanitasi layak tidak hanya penting untuk kenyamanan hidup sehari-hari, tetapi juga berdampak pada kesehatan dan ekonomi. ketiadaan sanitasi yang memadai juga memperburuk kesehatan terutama di daerah terpencil (Indonesia.Go.Id, 2024).

Berdasarkan lembar informasi dari USAID IUWASH Tangguh (2023) Provinsi Jawa Tengah memerlukan pasokan air yang besar untuk memenuhi kebutuhan air minum penduduk yang terus bertambah. Penurunan jumlah air baku menjadi tantangan bagi Perumda dalam meningkatkan produksi. Selain itu, sumber air baku yang digunakan oleh Perumda beresiko terkontaminasi akibat pembuangan limbah yang tidak aman. Salah satu isu utama dalam pengembangan air minum dan sanitasi di Jawa Tengah adalah belum meratanya akses terhadap air minum dan sanitasi yang aman.



Sumber: BPS Jawa Tengah (diolah penulis)

Gambar 1.7 Persentase Rumah Tangga Terhadap Akses Sanitasi Layak Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023



Sumber: BPS Jawa Tengah (diolah penulis)

Gambar 1.8 Persentase Rumah Tangga Terhadap Akses Sumber Air Minum Bersih Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

Berdasarkan Gambar 1.7 dan 1.8, data dari BPS mengungkapkan bahwa masih terdapat ketimpangan antar wilayah yang cukup tinggi antar rumah tangga terhadap akses untuk mendapatkan sumber air minum bersih dan sanitasi yang layak. Kondisi ini tidak hanya memengaruhi kesehatan masyarakat tetapi juga produktivitas dan potensi ekonomi mereka.

Beberapa penelitian terdahulu telah menggunakan metode klasterisasi untuk menganalisis pola kemiskinan di Indonesia. Khalif et al. (2024) melakukan penelitian komprehensif dengan mengklasterisasi tingkat kemiskinan di 34 provinsi Indonesia selama periode 2015-2022. Hasil penelitian tersebut menghasilkan tiga klaster utama yakni sangat miskin, miskin, dan rentan miskin. Dia juga mendemonstrasikan efektivitas pendekatan klasterisasi dalam membedakan tingkat kemiskinan yang bervariasi di Indonesia.

Dalam penelitian serupa, Erda et al. (2023) mengembangkan kategorisasi yang lebih sederhana dengan membagi tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 2021 menjadi dua level, yaitu level tinggi dan level rendah. Pendekatan ini memberikan perspektif yang lebih fokus dalam mengidentifikasi kesenjangan antar wilayah. Sementara itu Bahauddin et al. (2021) mengusulkan pendekatan tiga klaster yang membagi tingkat kemiskinan menjadi kategori rendah, sedang, dan tinggi. Hal ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam dalam analisis kemiskinan regional.

Penelitian dengan pendekatan lain yang dilakukan oleh Rusli et al. (2022) di DI Yogyakarta menggunakan analisis komponen utama untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kesenjangan sosial. Penelitian ini menghasilkan dua komponen utama yaitu komponen kemampuan masyarakat yang mencakup aspek

ekonomi dan pendidikan dan komponen perkembangan masyarakat yang mencakup kesehatan kependudukan, dan laju pertumbuhan ekonomi. metode ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang interkoneksi berbagai faktor yang memengaruhi kesenjangan sosial di DI Yogyakarta.

Tahir et al. (2021) dalam penelitiannya di Provinsi Sulawesi Selatan mengidentifikasi delapan komponen utama yang memengaruhi kemiskinan, dengan tiga komponen terpenting yaitu standar/kualitas kehidupan, kualitas pendidikan, dan ekonomi. Pendekatan multikomponen ini menyoroti kompleksitas faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kemiskinan.

Sementara penelitian yang dilakukan oleh Halida et al. (2020) di Provinsi Kalimantan Tengah terkait analisis faktor untuk mengidentifikasi determinan kemiskinan menghasilkan dua faktor utama. Faktor pertama terkait pendidikan, status dan sektor pekerjaan, sementara faktor kedua berfokus pada pendapatan perkapita untuk makanan. Temuan ini menekankan pentingnya aspek pendidikan dan pekerjaan dalam pengentasan kemiskinan.

Yafi et al. (2023) melakukan penelitian yang lebih komprehensif dengan mengintegrasikan analisis komponen utama dan klasterisasi dalam menganalisis kemiskinan di Pulau Kalimantan. Penelitian ini berhasil mengidentifikasi tiga komponen utama yang kemudian digunakan sebagai dasar pengelompokan wilayah dengan hasil pengelompokan menjadi dua klaster. Pendekatan terintegrasi ini memberikan perspektif yang lebih komprehensif dalam memahami pola kemiskinan regional.

Dari hasil analisis komprehensif terhadap kondisi kemiskinan di berbagai lokasi, muncul permasalahan mendasar tentang bagaimana mengidentifikasi faktor-faktor atau aspek-aspek yang berkontribusi terhadap tingginya tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Meskipun berbagai program pengentasan kemiskinan telah dilaksanakan dan pemerintah telah memiliki DTKS sebagai basis data untuk program bantuan sosial, angka kemiskinan di Jawa Tengah masih berada di atas rata-rata nasional. DTKS yang berfungsi sebagai instrument pendataan untuk targeting bantuan sosial perlu dilengkapi dengan analisis komprehensif yang dapat mengidentifikasi kemiskinan berdasarkan aspek-aspek yang berkontribusi terhadap tingkat kemiskinan. Selain itu, dengan mengelompokkan tingkat kemiskinan berdasarkan wilayah dapat memberikan gambaran untuk merancang intervensi yang lebih tepat sasaran dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Pemilihan Provinsi Jawa Tengah sebagai fokus penelitian ini didasarkan pada beberapa pertimbangan meskipun DI Yogyakarta memiliki persentase kemiskinan tertinggi di Pulau Jawa, Jawa Tengah memiliki populasi dan luas wilayah yang jauh lebih besar, sehingga dampak penelitian dapat menjadi lebih signifikan.

Selain itu, perbedaan jumlah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta sangatlah berbeda. DI Yogyakarta hanya memiliki 5 kabupaten/kota sedangkan Provinsi Jawa Tengah memiliki 35 kabupaten/kota (Oktaviani & Nailufar, 2023). Di samping itu data tahun 2024 menyebutkan bahwa jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah mencapai 3,70 juta jiwa, jauh melebihi DI Yogyakarta yang berjumlah 455.550 jiwa. Meskipun kedua provinsi tersebut

mencatat penurunan angka kemiskinan dibandingkan tahun 2023, peringkat kemiskinan relatif tidak berubah (Harminanto, 2024). Dengan pertimbangan tersebut penelitian yang dilakukan di Provinsi Jawa Tengah berpotensi memberikan dampak yang lebih luas dan signifikan.

Pertimbangan terakhir dalam pemilihan Jawa Tengah sebagai fokus penelitian adalah meskipun persentase kemiskinan di DI Yogyakarta lebih tinggi, namun Jawa Tengah memiliki indeks kedalaman kemiskinan yang melebihi DI Yogyakarta. Data dari BPS menunjukkan Indeks Kedalaman Kemiskinan Jawa Tengah sebesar 1,75 dan DI Yogyakarta sebesar 1,72, hal ini menunjukkan bahwa, intensitas kemiskinan yang dialami lebih berat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif berbagai aspek-aspek kemiskinan di Jawa Tengah yang mencakup dimensi sosial-ekonomi, dimensi kesehatan, dimensi pendidikan, serta dimensi infrastruktur/standar hidup layak. Analisis mendalam terhadap dimensi-dimensi tersebut dan pengelompokan tingkat kemiskinan berdasarkan wilayah, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang tantangan dan peluang dalam upaya pengentasan kemiskinan, serta menjadi landasan penting bagi perumusan kebijakan dan pembentukan program yang lebih tepat sasaran. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan pula dapat memberikan kontribusi signifikan terutama dalam mendukung pencapaian target-target *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya tujuan yang pertama yaitu pengentasan kemiskinan.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Aspek-aspek dimensi apa saja yang memengaruhi tingkat kemiskinan di Jawa Tengah pada Tahun 2023?
2. Bagaimana aspek-aspek yang memengaruhi tingkat kemiskinan di Jawa Tengah pada Tahun 2023 tersebut diklasifikasikan dalam klaster-klaster?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis aspek-aspek dimensi yang memengaruhi tingkat kemiskinan di Jawa Tengah pada tahun 2023.
2. Untuk menggambarkan tingkat kemiskinan di Jawa Tengah pada tahun 2023 dalam klaster-klaster dari aspek-aspek yang terbentuk.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Pengembangan Ilmu

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan pada pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ekonomi pembangunan, khususnya terkait analisis kemiskinan regional. Selain itu, penelitian ini diharapkan juga dapat memperkaya literatur akademik tentang pola dan dinamika kemiskinan di Indonesia, terutama di Provinsi Jawa Tengah.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan gambaran terkait analisis mendalam tentang dinamika kemiskinan di Jawa Tengah. Identifikasi aspek-aspek kunci dan klasterisasi yang dihasilkan diharapkan dapat berkontribusi bagi para pembuat kebijakan, organisasi masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan lainnya dalam merancang dan mengimplementasikan program-program pengentasan kemiskinan yang lebih terarah dan berkelanjutan. Tidak hanya di Jawa Tengah tetapi juga di wilayah lain dengan karakteristik serupa di Indonesia.

1.5. Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.5.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah pada tahun 2023 dengan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), situs resmi, serta situs pendukung lainnya.

1.5.2. Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan terhitung dari bulan September 2024 sampai dengan Februari 2025, dengan jadwal penelitian terlampir pada lampiran 1.